

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID BERBASIS LARAVEL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA CILEGON

Muhammad Rizal Muttaqin¹, Ahmad Tabrani²

¹ Program Studi Informatika, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Corresponding author: jalmutt56@gmail.com¹

Article history

Received:

dd-mm-yyyy

Accepted:

dd-mm-yyyy

Published:

dd-mm-yyyy

Copyright © 20xx
Jurnal Teknologi dan
Riset Terapan

Open Access

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Permohonan Informasi Publik PPID berbasis web menggunakan *framework* Laravel dan basis data MySQL pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon. Latar belakang penelitian didasarkan pada permasalahan operasional yang ditemukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), di mana proses permohonan informasi publik masih menggunakan *Google Form* sehingga data tidak tersimpan dalam basis data terintegrasi, pemantauan status permohonan dilakukan secara manual, dan penyusunan laporan pelayanan memerlukan rekapitulasi data yang cukup lama. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan pengembangan sistem, yang meliputi analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara, perancangan basis data MySQL dan arsitektur MVC pada Laravel, implementasi sistem, serta pengujian fungsional (*black box testing*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengintegrasikan data permohonan dalam satu basis data terpusat, menyediakan *dashboard* monitoring pelayanan, mengelola status permohonan secara *real-time*, serta menghasilkan laporan PDF secara otomatis menggunakan DomPDF. Implementasi sistem memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik, mengurangi proses administrasi manual, mempercepat pengolahan data, serta meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, sistem ini dapat dijadikan sebagai solusi digital untuk mendukung transformasi pelayanan informasi publik yang lebih modern, terintegrasi, dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata Kunci: Sistem Informasi, PPID, Keterbukaan Informasi Publik, Laravel, MySQL

Abstract

This study aims to develop a web-based Public Information Request Information System (PPID) using the Laravel framework and a MySQL database for the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Encryption of Cilegon City. The research is motivated by operational issues identified during a field internship (PKL), specifically that the public information request process relied on Google Forms—resulting in data not being stored in an integrated database—while request status monitoring was manual and service report compilation required time-consuming data recapitulation. A descriptive-qualitative research method was employed, utilizing a system development approach that encompassed requirements analysis (via observation and interviews), MySQL database and Laravel MVC architecture design, system implementation, and functional testing (black-box testing). The results demonstrate that the developed system successfully integrates request data into a centralized database, provides a service monitoring dashboard, manages request statuses in real-time, and automatically generates PDF reports using DomPDF. Implementing the system has positively impacted the effectiveness and efficiency of public information services by reducing manual administrative tasks, accelerating data processing, and enhancing service transparency for the public. Consequently, this system serves as a digital solution to support the transformation of public information services into a more modern, integrated, and accountable system, in accordance with the mandate of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness.

Keywords: Information System, PPID (Public Information Management and Documentation Officer), Public Information Transparency, Laravel, MySQL

1.0 PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi dan telaah terhadap praktik penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon, ditemukan adanya kesenjangan antara amanat regulasi dengan implementasi teknis di lapangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tetapi menjadi tugas seluruh badan publik beserta sumber daya manusianya.

Namun, dalam praktiknya, proses permohonan informasi publik pada PPID Dinas Kominfo Kota Cilegon masih menggunakan *Google Form* sebagai media pengajuan. Penggunaan platform generik ini menimbulkan beberapa kendala operasional yang signifikan: (1) data permohonan tidak tersimpan dalam basis data internal instansi, (2) proses pemantauan status permohonan dilakukan secara manual, dan (3) penyusunan laporan pelayanan memerlukan rekapitulasi yang cukup lama. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian pada PPID Kabupaten Solok Selatan yang mengidentifikasi bahwa aktivitas layanan tidak terkelola dalam sistem informasi sehingga respons terhadap permohonan menjadi lambat, serta beberapa informasi publik tidak dapat diunduh dengan baik[1]. Permasalahan serupa juga ditemukan pada PPID Kabupaten Situbondo, di mana proses pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pembantu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta menyulitkan pencarian dokumen ketika terdapat permohonan dari masyarakat[2].

Permasalahan tersebut menyebabkan pelayanan informasi publik belum berjalan secara optimal dan berimplikasi pada rendahnya efektivitas pengelolaan data, lambatnya proses administrasi, serta kurangnya transparansi dalam pemantauan status permohonan. Padahal, teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih masif, cepat, dan merata. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya yang melekat dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar kewajiban administratif, dan Komisi Informasi merupakan mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data permohonan secara terpusat, menyediakan fitur monitoring layanan secara *real-time*, serta menghasilkan laporan secara otomatis. Pengembangan sistem informasi PPID berbasis *website* telah menjadi solusi yang

diimplementasikan di berbagai daerah. Penelitian di Kota Bogor mengembangkan sistem informasi PPID menggunakan *framework Laravel* dengan pendekatan *Agile*, yang menghasilkan aplikasi dengan fitur permohonan informasi, verifikasi data, pemberian keputusan, hingga pengelolaan keberatan informasi publik. Penelitian serupa di Kabupaten Solok Selatan menggunakan metode *Waterfall* dengan *Laravel* dan *MySQL* untuk mengatasi masalah lambatnya respons dan kesulitan akses informasi. Keunggulan *Laravel* sebagai *framework* pengembangan terletak pada struktur pengkodean yang teratur, performa yang lebih stabil, serta keamanan yang lebih baik dibandingkan *framework* lainnya.

2.0 METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon sebagai bagian dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan pengembangan sistem informasi. Penggunaan metode ini sejalan dengan penelitian pengembangan sistem informasi pada berbagai instansi pemerintah yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kondisi nyata dan kebutuhan pengguna sebelum melakukan perancangan sistem.

Tahap pertama dilakukan analisis kebutuhan sistem melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan PPID yang sedang berjalan. Teknik observasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara mendalam problematika operasional yang dihadapi dalam pengelolaan permohonan informasi publik. Selain itu, dilakukan wawancara dengan petugas administrator untuk memperoleh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem secara komprehensif. Kombinasi observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian pengembangan sistem informasi untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna terakomodasi dengan baik.

Tahap kedua adalah perancangan sistem yang meliputi perancangan basis data menggunakan *MySQL* serta perancangan arsitektur aplikasi menggunakan pola Model-View-Controller (MVC) pada *framework Laravel*. Penggunaan arsitektur MVC dalam pengembangan sistem informasi berbasis web memberikan keunggulan dalam hal pemisahan logika bisnis, tampilan antarmuka, dan pengendalian alur data, sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa mendatang. *Framework Laravel* dipilih karena merupakan *framework PHP* yang bersifat open source dengan konsep MVC yang mendukung pengembangan sistem secara terstruktur dan efisien[1].

Tahap ketiga merupakan implementasi sistem dengan menggunakan *Laravel* sebagai *framework* utama, *MySQL* sebagai basis data, dan *DomPDF* sebagai pustaka untuk menghasilkan laporan dalam format PDF. Pemilihan teknologi ini didasarkan pada kebutuhan untuk

menghasilkan laporan pelayanan secara otomatis, yang menjadi salah satu solusi atas permasalahan rekapitulasi data yang memakan waktu cukup lama pada proses manual sebelumnya. Penelitian pengembangan sistem informasi PPID di Kabupaten Solok Selatan juga menggunakan kombinasi teknologi yang serupa, yaitu Laravel dan MySQL, untuk mengatasi permasalahan lambatnya respons pelayanan dan kesulitan akses informasi publik. Hal yang sama ditemukan pada pengembangan PPID Kota Bogor yang juga memanfaatkan Laravel sebagai framework utama[1]. Tahap terakhir adalah pengujian sistem yang dilakukan menggunakan metode pengujian fungsional (*functional testing*) untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Metode Black Box Testing merupakan pendekatan pengujian fungsional yang berfokus pada verifikasi output sistem berdasarkan input yang diberikan tanpa perlu mengetahui struktur kode program internal. Penelitian pengembangan sistem informasi penyewaan lapangan bulu tangkis berbasis web menggunakan metode Black Box Testing dan berhasil memvalidasi seluruh skenario pengujian. Demikian pula pada pengembangan sistem pendaftaran berbasis web, pengujian Black Box menunjukkan bahwa 100% fungsionalitas sistem berjalan dengan status "Valid".

3.0 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Permasalahan

Hasil observasi menunjukkan bahwa layanan permohonan informasi publik di PPID Dinas Kominfo Kota Cilegon masih bergantung pada Google Form sebagai media pengajuan, sehingga data permohonan tidak tersimpan dalam basis data yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan berbagai kendala operasional, di antaranya administrator mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian data historis, pemantauan status layanan secara real-time tidak dapat dilakukan, dan proses penyusunan laporan berkala menjadi tidak efisien karena data tersebar dan tidak terstruktur. Permasalahan serupa juga ditemukan pada pengawasan Ombudsman di berbagai daerah, yang mengidentifikasi bahwa PPID belum aktif secara optimal, respons permohonan informasi masih lambat, serta kanal layanan digital belum responsif. Secara administratif, PPID memang telah terbentuk di banyak badan publik, namun kualitas fungsi dan keaktifan belum merata, sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh informasi yang menjadi haknya.

Selain itu, tidak tersedianya dashboard monitoring menyebabkan proses evaluasi pelayanan harus dilakukan secara manual tanpa dukungan visualisasi data yang memadai. Administrator juga harus melakukan rekapitulasi data secara berulang untuk menghasilkan laporan pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan setiap badan publik menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik. Badan publik idealnya menetapkan kebijakan internal melalui regulasi teknis dan penunjukan PPID guna menjamin hak masyarakat terhadap akses informasi yang terbuka dan berkualitas.

Dalam praktik di lapangan, kendala internal seperti keterbatasan SDM dan pemahaman teknis di lingkungan PPID pelaksana, serta kendala eksternal berupa kurangnya literasi masyarakat terhadap prosedur permintaan informasi, turut menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan koordinasi antar unit kerja menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang responsif, inklusif, dan berkualitas.

3.2. Implementasi Sistem yang Dikembangkan

Sistem Informasi Permohonan Informasi Publik PPID berhasil dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dan basis data MySQL. Implementasi teknologi ini sejalan dengan praktik pengembangan sistem informasi PPID di berbagai daerah, di mana Laravel dipilih karena mendukung arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang terstruktur, memiliki performa yang lebih stabil, serta menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan *framework* lainnya. Penggunaan basis data MySQL juga menjadi pilihan umum dalam pengembangan sistem sejenis karena keandalan dan kemudahan pengelolaannya[3].

Fitur ini digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara daring dengan mengisi identitas pemohon, tujuan penggunaan informasi, rincian informasi yang diminta, serta mengunggah dokumen pendukung. Keberadaan fitur ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus hadir secara fisik, sejalan dengan upaya digitalisasi layanan publik[2].

Gambar 1. Formulir

Fitur *login* digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna sehingga hanya administrator yang memiliki hak akses yang dapat mengelola data permohonan. Laravel menyediakan fitur keamanan bawaan seperti autentikasi pengguna, *middleware*, dan perlindungan CSRF yang memastikan keamanan akses sistem.

Gambar 2. Halaman Login

Dashboard menyediakan informasi statistik pelayanan yang meliputi jumlah permohonan masuk, permohonan diproses, permohonan selesai, dan permohonan ditolak. Keberadaan *dashboard* ini memungkinkan evaluasi pelayanan secara cepat dan akurat tanpa perlu pengolahan data manual, sebagaimana menjadi kebutuhan dalam pengembangan sistem PPID.



Gambar 3. Dashboard

Administrator dapat melihat, mengubah, menghapus, dan memverifikasi data permohonan yang masuk melalui sistem secara terpusat. Fitur ini mengatasi permasalahan sebelumnya di mana data permohonan tidak tersimpan dalam basis data internal instansi, sehingga menyulitkan pencarian data dan audit pelayanan.

Gambar 4. Pengelolaan Data Permohonan

Fitur ini memungkinkan administrator memperbarui status permohonan sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan layanan secara lebih transparan. Hal ini mengatasi kendala pemantauan status secara manual yang sebelumnya menjadi kendala dalam pelayanan.

Gambar 5. Manajemen Status Permohonan

Riwayat permohonan digunakan untuk menyimpan seluruh aktivitas layanan sehingga memudahkan proses pelacakan data dan audit pelayanan. Penyimpanan data secara terpusat dalam basis data MySQL memungkinkan pencarian data historis dilakukan dengan lebih efisien.

Permohonan Selesai / Ditolak

NO	NO REGISTRASI	PEMOHON & KONTAK	OPD TUJUAN	STATUS	TANGGAL SELESAI	AKSI
1	REG-20200421-6904807-151242	Muti 081234567890 muti@gmail.com	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DITOLAK	21 Apr 2020	Detail
2	REG-20200421-6904807-151242	Rizal Muttakin 081234567890 rizal@gmail.com	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SELESAI	21 Apr 2020	Detail
3	REG-20200421-6904807-151242	YB 081234567890 yb@gmail.com	Dinas Pariwisata	DITOLAK	14 Apr 2020	Detail
4	REG-20200421-6904807-151242	Rizal 081234567890 rizal@gmail.com	Dinas Pekerjaan Umum	SELESAI	07 Apr 2020	Detail

Gambar 6. Riwayat Permohonan

Sistem terintegrasi dengan DomPDF yang memungkinkan administrator menghasilkan laporan pelayanan dalam format PDF secara otomatis tanpa perlu melakukan pengolahan data manual. Fitur ini menjawab permasalahan penyusunan laporan berkala yang sebelumnya memerlukan rekapitulasi data secara berulang dan memakan waktu cukup lama.

Laporan Data Permohonan Informasi

Periode: 2020-04-01 s.d 2020-04-30
Status: Semua

No	No. Reg	Pemohon & Pekerjaan	Kontak & Alamat	Rincian Informasi	Tujuan Penggunaan	OPD Tujuan	Cara Mengetahui & Salinan	Status	Tanggal
1	REG-20200421-6904807-151242	Rizal BUNY	HP: 1234567890 Email: muti@gmail.com Alamat: Cilegon	Call bersama	Muti	Dinas Pekerjaan Umum	Whatsapp	Selesai	01/04/2020
2	REG-20200421-6904807-151242	YB	HP: 1234567890 Email: yb@gmail.com Alamat: Cilegon	Call	Muti	Dinas Pariwisata	Whatsapp	Ditolak	01/04/2020
3	REG-20200421-6904807-151242	Rizal Muttakin Engineering	HP: 081234567890 Email: rizal@gmail.com Alamat: Cilegon	Informasi perkembangan pekerjaan untuk kubah	ingin mencari informasi pekerjaan untuk kubah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Whatsapp	Selesai	20/04/2020
4	REG-20200421-6904807-151242	Muti	HP: 081234567890 Email: muti@gmail.com Alamat: Serang	Informasi aturan perdagangan	sempurna tidak ada hal yang merugikan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Memoranda	Ditolak	21/04/2020
5	REG-20200421-6904807-151242	Dina	HP: 081234567890 Email: dina@gmail.com Alamat: Serang	harga sembako	naik atau turun	Dinas Tatakelola dan Pertanahan	Memoranda Salinan (untuk lampiran)	Diproses	22/04/2020

Laporan digenerate otomatis oleh sistem PPID Kota Cilegon.

Gambar 7. Manajemen Status Permohonan

3.3 Pembahasan

Implementasi sistem informasi yang dikembangkan memberikan berbagai manfaat dibandingkan metode sebelumnya. Pengelolaan data yang sebelumnya dilakukan melalui *Google Form* kini dapat dilakukan secara terpusat menggunakan basis data MySQL. Hal ini meningkatkan efisiensi pencarian data dan mengurangi risiko kehilangan informasi, sebagaimana menjadi tujuan pengembangan sistem PPID di berbagai daerah. Fitur dashboard monitoring memungkinkan administrator memperoleh informasi pelayanan secara cepat dan akurat. Selain itu, fitur manajemen status memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai perkembangan permohonan yang diajukan, yang merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penggunaan *framework* Laravel memberikan kemudahan dalam pengembangan sistem karena mendukung arsitektur MVC yang terstruktur serta memiliki fitur

keamanan bawaan. Hal ini sejalan dengan penelitian pengembangan sistem PPID di Kota Bogor dan Kabupaten Solok Selatan yang juga memanfaatkan Laravel sebagai *framework* utama Integrasi DomPDF juga membantu mempercepat proses penyusunan laporan pelayanan sehingga pekerjaan administratif menjadi lebih efisien.

4.0 KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan Sistem Informasi Permohonan Informasi Publik PPID berbasis web menggunakan *framework* Laravel dan basis data MySQL pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon. Sistem yang dibangun mampu mengintegrasikan data permohonan informasi publik dalam satu basis data terpusat, menyediakan *dashboard* monitoring pelayanan, mengelola status permohonan secara *real-time*, serta menghasilkan laporan PDF secara otomatis. Pendekatan pengembangan ini sejalan dengan penelitian serupa pada PPID Kabupaten Solok Selatan yang juga memanfaatkan Laravel dan MySQL untuk mengatasi permasalahan lambatnya respons pelayanan dan kesulitan akses informasi publik (Khaliq, Pradana, & Hanggara, 2022). Integrasi data terpusat mengatasi permasalahan sebelumnya di mana data permohonan tidak tersimpan dalam basis data internal, sehingga menyulitkan pencarian data historis dan proses audit pelayanan. Keberadaan *dashboard* memungkinkan evaluasi pelayanan secara cepat dan akurat tanpa pengolahan data manual, sementara manajemen status yang *real-time* memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai perkembangan permohonan yang diajukan. Penggunaan *framework* Laravel memberikan kemudahan dalam pengembangan karena mendukung arsitektur MVC yang terstruktur serta memiliki fitur keamanan bawaan seperti autentikasi pengguna, *middleware*, dan perlindungan CSRF yang menjamin keamanan akses sistem.

Implementasi sistem memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik, mengurangi proses administrasi manual, mempercepat pengolahan data, serta meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan setiap badan publik menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Transformasi digital layanan publik melalui optimalisasi peran PPID dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis SPBE menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Hendrian, Rahadjeng, & Said, 2025). Dengan demikian, sistem ini dapat dijadikan sebagai solusi digital untuk mendukung transformasi pelayanan informasi publik yang lebih modern, terintegrasi, dan akuntabel, sebagaimana ditemukan dalam berbagai penelitian pengembangan sistem informasi pada instansi pemerintah yang menunjukkan bahwa implementasi sistem terintegrasi berbasis web mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan akurasi informasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Khaliq, F. Pradana, and B. T. Hanggara, "Pengembangan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Solok Selatan berbasis Website," *J. Pengemb. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput.*, vol. 6, no. 11, pp. 5146–5153, 2022.
- [2] E. F. Hermawan, A. Homaidi, and F. Santoso, "PENGEMBANGAN APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SITUBONDO," *E-Link J. Tek. Elektro dan Inform.*, vol. 19, no. 2, pp. 217–224, 2024.
- [3] A. L. Wangi, A. A. Nugraha, and T. D. Rimadhani, "RANCANG BANGUN BACK END WEBSITE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL," 2024.